

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2019. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Amiruddin. 2010. *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Andi Hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Arini T. Soemohadiwidjojo. 2014. *Mudah Menyusun SOP (Standard Operating Procedure)*. Jakarta: Penebar Plus.

Azis Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika.

D. Schaffmeister, N. Keijzer En E.Ph. Sutorius. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Deddy Mulyana. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

E.C.W. Neloe. 2012. *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Verbum Publishing.

Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

Fajar Nur'aini. 2020. *Standard Operating Procedure (Cara Praktis dan Efektif Menerapkan SOP di Segala Macam Bisnis)*. Yogyakarta: Quadrant.

Hartanto (dkk). 2020. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Sleman: Deepublish.

Hasanal Mulkan. 2022. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta. Kencana.

Herman Darmawi. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengenal Operasional Perbankan 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Indra Mahardika Putra. 2021. *Panduan Mudah Menyusun SOP (Langkah Utama Menciptakan Pengendalian Mutu yang Baik)*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group.

Leden Marpaung. 2006. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).

Mirrian Sjöfyan Arif (dkk). 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Banten: Penerbit Universitas Terbuka.

Mohamad Irianto. 2014. *Prosedur Audit Operasional Bank: Audit Terapan Berbasis Risiko*. Bandung.

Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Pahami & Hindari (Buku Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan)*. Jakarta Pusat: Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.

P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Jakarta: Kencana.

Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP)*. Jakarta: Kencana.

Toto Pranoto. 2017.  *Holding Company BUMN (Konsep, Implementasi, dan Benchmarking)*. Jakarta: Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.

Trisadini P. dan Abd. Somad. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.

## **B. Jurnal**

Abdul Hayy Nasution. 2017. “Penerapan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Administrative Penal Law (Studi Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2))”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 7 No. 1.

Aikaterini Tsampi. 2020. “The New Doctrine on Misuse of Power Under Article 18 ECHR: Is It About The System of Contre-Pouvoirs Within The State After All?”. *Netherlands Quarterly of Human Rights*. Volume 38 Issue 2. June 2020.

Angelos Gogo Siregar. 2023. “Implementasi Asas *Ultimum Remedium* terhadap Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Administratif”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. vol. 3. No. 4.

Edward Omar Sharif Hiariej. 2021. “Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak (*Principle of Lex Specialist Systematic and Tax Criminal Law*)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 21 No. 1.

- Endang Retnowati. 2022. “Penegakan Hukum dan Bentuk *Fraud* dalam Kegiatan Usaha Bank”. *Perspektif*. Volume 27 Nomor 1.
- H. Bachtiar Simatupang. 2019. “Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*. Vol.6. No.2.
- Hajriyanti, dkk. 2022. “Ketentuan Pidana Administrasi (*Administrative Penal Law*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Volume 11. Nomor 3.
- Heriyanto dan Mustofa. 2020. “Tanggung Jawab Hukum Direksi Bank Bumh Atas Kerugian Bank (Studi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1144 K/Pid/2006)”. *Jurnal al hukmi*. Vol.1. No. 1.
- Ifrani. 2017. “Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa”. *Jurnal Al’Adl*. Volume 9 Nomor 3.
- Indriyanto Seno Adji. 2007. “Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 25 Nomor 4.
- Laras Adysti Nariswari dan Febby Mutiara Nelson. 2023. “Application of the *Ultimum Remedium Principle* in the Formulation of Legislation and Law Enforcement related to Banking Crimes”. *Legal Brief*. Volume 12. Nomor 2.
- Moh. Alfatah Alti Putra. 2012. “Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah yang Tidak Dapat Dipidana”. *Justisi*. Volume 7 Nomor 2.

- Mohamad Rifki. 2019. “Reformasi Sanksi Administrasi Bersifat *Primum Remedium* dalam Mengelola Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporasi Pelanggaran Ketentuan di Bidang Perikanan)”. *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 1. Nomor 1.
- Mustandar, dkk. 2021. “Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. *Journal of Lex Generalis (JLS)*. Volume 2 Nomor 2.
- Rio Dhani Lasana (dkk). 2023. “The Effect of Operational Risks for Digital Banking Services at Banks”. *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol 14. No. 2.
- Salman Luthan. 2009. “Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan”. *Jurnal Hukum*. Vol. 16. No. 4.
- Tchayo Kusumo. 2020. “Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertambangan Dikaitkan dengan Ajaran Perbarengan (*Concursus Idealis*) dalam Hukum Pidana”. *PANJI KEADILAN: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*. Volume 3. Nomor 2.
- Wahyu dan Subroto Rindang Arie Setyawan. 2022. “Kualifikasi Delik Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perbankan)”. *Wasaka Hukum*. Vol. 10. No. 1

Zuhud Arman dan Riko Riyanda. 2022. “Administrative Penal Law Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Hukum Samudra Kehidupan*. Vol. 17. No.2.

### **C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang *Otoritas Jasa Keuangan*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 dan 62/PPU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Nomor 1144 K/Pid/2006.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Nomor 1554 K/Pid.Sus/2014.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Nomor 1935 K/Pid.Sus/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Nomor 336 PK/PID.SUS/2022.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor

54/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg .

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel.

#### **D. Internet**

Detik News. 2018. *Kejagung Tangkap Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp 1 Triliun.*

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3929201/kejagung-tangkap-tersangka-kasus-kredit-fiktif-rp-1-triliun>.

Indonesia Corruption Watch. 2005. *Saat Sidang Kasus Kredit Macet Mandiri; Nelo*

*Lebih Banyak Menunduk.* <https://antikorupsi.org/id/article/saat-sidang-kasus-kredit-macet-mandiri-nelo-lebih-banyak-menunduk>.

Kompas. 2021. *Menurut Erick Thohir, Ini 3 Peran Bank BUMN dalam Pemulihan*

*Ekonomi.* <https://money.kompas.com/read/2021/08/06/180700126/menurut-erick-thohir-ini-3-peran-bank-bumn-dalam-pemulihan-ekonomi>.

Media Indonesia. 2020. *Pelanggaran SOP Bank Bukan Pidana.*

[https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/328481/pelanggaran-sop-bank-bukan-pidana#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/328481/pelanggaran-sop-bank-bukan-pidana#google_vignette).

Rahajeng Kusumo Hastuti. 2021. *Benarkah Bisnis Bank BUMN Masih Tumpang*

*Tindih?.* CNBC Indonesia,

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20210830122800-17-272235/benarkah-bisnis-bank-bumn-masih-tumpang-tindih>.

Sinar Harapan.Co. 2020. *Pakar Hukum: Pelanggaran SOP Bank Swadesi Bukan Pidana*. <https://www.sinarharapan.co/ekonomi/pr-3852821137/Pakar-Hukum-Pelanggaran-SOP-Bank-Swadesi-Bukan-Pidana>.

UNAIR News. 2022. *Guru Besar FH UNAIR Paparkan Konsep Administrative Penal Law dan Penegakan Hukumnya*. <https://unair.ac.id/guru-besar-fh-unair-paparkan-konsep-administrative-penal-law-dan-penegakan-hukumnya/>.

### **E. Sumber lainnya**

Ikatan Hakim Indonesia. 2006. “Varia Peradilan”. No. 267 Februari 2006.

Indriyanto Seno Adji. 2006. “*Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid*” dan Tindak Pidana Korupsi, *Prosiding Seminar Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan*. Center For Finance and Securities Law (CFISEL), Jakarta: 31 Mei 2006.

Sundari Arie. 2006. “Tindakan Pidana di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait serta Permasalahan Praktiknya”, *Prosiding Seminar Tindak Pidana Perbankan: Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan*. Center For Finance and Securities Law (CFISEL), Jakarta: 31 Mei 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Syahrir Ika. 2021. “Meneropong Arah Sektor Keuangan”. Warta Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI. Edisi III/2021.